

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2018

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

EKSISTENSI DAN DETERMINAN *MIDDLE INCOME TRAP* DI INDONESIA

Hotmaria Elecktawati Lumbangaol dan Ernawati Pasaribu

**PENGOLAHAN BIJI KAKAO PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI**

Radot Manalu

***MACRO STRESS TEST MODEL* RISIKO KREDIT:**

STUDI EMPIRIS PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA

Indra

KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROVINSI-PROVINSI SUMATERA TAHUN 2010-2015

Juli Panglima Saragih

**HUBUNGAN DANA BAGI HASIL DENGAN PENERIMAAN DAERAH DAN
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Mandala Harefa

**ANALISIS SALURAN PEMASARAN LIMA PANGAN POKOK DAN PENTING
DI LIMA KABUPATEN SUMATERA UTARA**

Muhammad Ilham Riyadh

***THE ROLE OF MASS COMMUNICATIONS TO THE MARKET INTERVENTIONS
OF RICE COMMODITY IN INDONESIA***

Kumara Jati dan Arie Mardiansyah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2018

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vii
Abstrak	ix-xvi
EKSISTENSI DAN DETERMINAN <i>MIDDLE INCOME TRAP</i> DI INDONESIA	
<i>Hotmaria Elecktawati Lumbangaol dan Ernawati Pasaribu</i>	83-97
PENGOLAHAN BIJI KAKAO PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI	
<i>Radot Manalu</i>	99-111
MACRO STRESS TEST MODEL RISIKO KREDIT: STUDI EMPIRIS PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA	
<i>Indra</i>	113-129
KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROVINSI-PROVINSI SUMATERA TAHUN 2010-2015	
<i>Juli Panglima Saragih</i>	131-146
HUBUNGAN DANA BAGI HASIL DENGAN PENERIMAAN DAERAH DAN KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
<i>Mandala Harefa</i>	147-160
ANALISIS SALURAN PEMASARAN LIMA PANGAN POKOK DAN PENTING DI LIMA KABUPATEN SUMATERA UTARA	
<i>Muhammad Ilham Riyadh</i>	161-171
THE ROLE OF MASS COMMUNICATIONS TO THE MARKET INTERVENTIONS OF RICE COMMODITY IN INDONESIA	
<i>Kumara Jati dan Arie Mardiansyah</i>	173-186

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) kembali terbit di hadapan pembaca yang budiman dengan tujuh karya tulis yang membahas hasil penelitian dan kajian terhadap sejumlah isu ekonomi dan kebijakan publik. Pada edisi Volume. 9 No. 2 Desember 2018 ini, JEKP menerima tulisan dari berbagai institusi dan lembaga, yakni akademisi dari sejumlah universitas dan peneliti kementerian/lembaga. Ketujuh karya tulis ilmiah tersebut membahas secara mendalam persoalan isu pendapatan nasional kelas menengah, perkebunan kopi rakyat, perbankan syariah, industri manufaktur, kebijakan transfer fiskal, distribusi pangan dan pasokan, serta stabilitas harga beras. Beragamnya lembaga asal penulis dan isu-isu yang diangkat tentunya diharapkan dapat semakin memperkaya serta memperkokoh fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di sisi bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Karya tulis yang berjudul **“Eksistensi dan Determinan *Middle Income Trap* di Indonesia”** dan ditulis oleh Hotmaria Elecktawati Lumbangaol bersama Ernawati Pasaribu mengawali edisi jurnal kali ini. Tulisan ini membahas lebih fokus pada pandangan Bank Dunia yang mengklasifikasikan Indonesia selama 13 tahun terakhir ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income country*). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan dalam waktu yang lama dan membuat potensi Indonesia masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah (*Middle Income Trap*) sangat besar. Dari hasil identifikasi didapatkan hasil bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi berpengaruh positif terhadap PNB per kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan sektor manufaktur berpengaruh sebaliknya dalam jangka panjang. Struktur perekonomian yang tidak didukung bersama-sama oleh sektor-sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tidak berjalan dengan baik dan mengindikasikan Indonesia telah masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sektor jasa, PMTB, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi (*human capital*). Selain itu, sektor pertanian dan manufaktur di Indonesia sebagai upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransisi menuju negara maju pun perlu disasar.

Pada karya tulis *kedua* yang ditulis oleh Radot Manalu berjudul **“Pengolahan Biji Kakao Produksi Perkebunan Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Petani”**. Tulisan ini membahas secara mendalam hasil penelitian terkait usaha para petani perkebunan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memerhatikan mutu biji kakao karena pada umumnya petani menjual biji kakao hasil pertaniannya belum difermentasi. Melalui pengolahan biji kakao dengan teknologi fermentasi akan mendapatkan mutu dan nilai ekonomi yang lebih baik karena harga biji kakao fermentasi lebih tinggi dari harga biji kakao yang tidak difermentasi. Selain peningkatan mutu untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pakan ternak dari limbah biji kakao yang difermentasi juga lebih baik dibandingkan dengan biji kakao yang tidak difermentasi. Dalam hal ini tentunya bimbingan teknis pengelolaan biji kakao dari pemerintah daerah kepada petani perkebunan rakyat sangat penting, agar mutu biji kakao petani dapat ditingkatkan. Selanjutnya, secara berkelanjutan program pengembangan kakao di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan produk biji kakao yang bermutu tinggi, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik terutama bagi petani sebagai pemasok biji kakao.

Tulisan *ketiga* berjudul **“*Macro Stress Test Model Risiko Kredit: Studi Empiris Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*”** ditulis oleh Indra. Tulisan ini membahas isu tentang pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (*macro stress test*) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (*BI Rate*) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Selanjutnya, tulisan yang *keempat* berjudul **“Kinerja Industri Manufaktur di Provinsi-Provinsi Sumatera Tahun 2010-2015”** yang ditulis oleh Juli Panglima Saragih menganalisis tentang kondisi industri manufaktur yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional yang dilihat dari kontribusi pada periode 2010-2015. Dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada analisis kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera. Secara nasional kontribusi industri manufaktur Pulau Sumatera relatif besar setelah Pulau Jawa dibandingkan daerah lain di luar Pulau Jawa. Alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah perlunya diversifikasi industri Pulau Sumatera sesuai potensi sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat struktur industri manufakturnya yang tidak hanya industri berbasis perkebunan dan sumber daya alam. Sedangkan kebijakan industri nasional jangka menengah pada tahun 2015-2019 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri di Pulau Sumatera dan Indonesia ke depan.

Karya tulis yang *kelima* ditulis oleh Mandala Harefa yang berjudul **“Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur”**. Penulis membahas tentang kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota telah meningkat secara signifikan. Namun, merujuk dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA, dalam hal ini produksi batubara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Tulisan *keenam* ditulis oleh Muhammad Ilham Riyadh dengan judul **“Analisis Saluran Pemasaran Lima Pangan Pokok dan Penting di Lima Kabupaten Sumatera Utara”**. Dalam karya tulis ini memfokuskan pembahasan dalam persoalan kurang meratanya ketersediaan pangan dan timpangnya jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Diketahui bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat produsen. Hasil analisis menjelaskan bahwa panjangnya saluran pemasaran akan meningkatkan disparitas harga yang tinggi sehingga dapat merugikan petani dan konsumen, komoditas padi mengalami disparitas tinggi 132 persen, rasio keuntungan petani komoditas cabai merah tertinggi 45,31 persen. *Farmer share* tertinggi komoditas cabai merah 89 persen. Tata struktur pasar yang dihadapi oleh petani beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi potong cenderung persaingan pasar tidak sempurna. Harga kesepakatan penjual dan pembeli merupakan hasil tawar-menawar, sedangkan cara pembayaran pembeli atas harga kesepakatan bisa dengan cara tunai dan angsuran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan terampil dalam kewirausahaan dalam upaya pembinaan petani, serta mengkhususkan diri untuk pelayanan dan pemasaran komoditas.

Karya tulis terakhir dalam edisi ini ditulis oleh Kumara Jati dan Arie Mardiansyah dengan judul **“The Role of Mass Communications to the Market Interventions of Rice Commodity in Indonesia”**. Kajian ini memusatkan analisisnya pada isu seberapa penting dan berpengaruhnya intervensi pasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di luar musim panen untuk mengendalikan dan mengelola harga beras dan inflasi. Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah melalui aspek komunikasi sebagai mekanisme untuk memengaruhi pasar dalam pengendalian harga dan dan stok beras di Indonesia. Dari hasil analisis diketahui bahwa komunikasi massa oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan konsumen) dapat berjalan dengan baik terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras. Namun, di sisi lain model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan variabel *dummy*, yaitu komunikasi massa, serta jumlah operasi pasar dan kebijakan beras kurang berpengaruh terhadap harga beras. Namun begitu, pengaruhnya lebih banyak terjadi pada stok beras. Oleh karena itu, otoritas terkait diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan beras untuk menjaga stabilitas harga dan stok dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sangat besar harapan kami agar karya tulis tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan kita sampaikan kepada seluruh mitra bebestari dan redaktur pelaksana yang telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan perbaikan, baik secara substansial maupun redaksional. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan jurnal edisi ini. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, terima kasih dan penghargaan juga sepatutnya kita sampaikan kepada Kapuslit BKD tanpa mana dukungan kedinasan dan program penerbitan secara berkelanjutan mustahil akan dapat diraih.

Jakarta, 31 Desember 2018
Hormat kami,
Dewan Redaksi

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2018

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Hotmaria Elecktawati Lumbangaol (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) dan Ernawati Pasaribu (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)

EKSISTENSI DAN DETERMINAN *MIDDLE INCOME TRAP* DI INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 83-97

Abstrak

Bank Dunia mengklasifikasikan negara Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income country*) selama 13 tahun terakhir. Hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan dalam waktu yang lama dan membuat potensi Indonesia masuk jebakan pendapatan menengah (*Middle Income Trap*) sangat besar. Penelitian ini, diantaranya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Indonesia telah masuk dalam MIT. Analisis *time series* ECM digunakan sekaligus untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan dalam jangka panjang untuk keluar atau terhindar dari jebakan pendapatan menengah. PNB per kapita sebagai dasar pengklasifikasian kelompok pendapatan negara-negara di dunia digunakan sebagai variabel untuk melihat MIT. Didapatkan hasil bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi akan berpengaruh positif terhadap PNB per kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan sektor manufaktur berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Struktur perekonomian yang tidak didukung bersama-sama oleh sektor-sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tidak berjalan dengan baik dan mengindikasikan Indonesia telah masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sektor jasa, PMTB, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi (*human capital*), serta memperbaiki sektor pertanian dan manufaktur di Indonesia sebagai upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransisi menuju negara maju.

Kata kunci: MIT, PNB per kapita, ECM.

Radot Manalu (Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu IPTEK (PAPPIPTEK)-LIPI)

PENGOLAHAN BIJI KAKAO PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 99-111

Abstrak

Kakao (*Theobroma cacao L*) merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional untuk peningkatan devisa negara. Namun demikian, mutu kakao Indonesia khususnya produksi biji kakao perkebunan rakyat masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani perkebunan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan belum memerhatikan mutu biji kakao karena pada umumnya petani menjual biji kakao hasil pertaniannya yang belum difermentasi. Jika petani perkebunan kakao rakyat mengolah biji kakao dengan teknologi fermentasi akan mendapatkan mutu dan nilai ekonomi yang lebih baik karena harga biji kakao fermentasi lebih tinggi dari harga biji kakao yang tidak difermentasi dengan selisih harga sekitar Rp3.000,-/kg – Rp5.000,-/kg. Selain peningkatan mutu untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pakan ternak dari limbah biji kakao yang difermentasi juga lebih baik dibandingkan dengan biji kakao yang tidak fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan merumuskan saran kebijakan guna meningkatkan mutu biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, bimbingan teknis pengelolaan biji kakao dari pemerintah daerah kepada petani perkebunan rakyat sangat penting agar mutu biji kakao petani dapat ditingkatkan. Selanjutnya, secara berkelanjutan program pengembangan kakao di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan produk biji kakao yang bermutu tinggi, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik terutama bagi petani sebagai pemasok biji kakao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan kerangka penelitian pengolahan biji kakao pascapanen sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Kata kunci: Pengelolaan, mutu, kakao, pendapatan, petani, teknologi.

Indra (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia)

MACRO STRESS TEST MODEL RISIKO KREDIT: STUDI EMPIRIS PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 113-129

Abstrak

Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (*macro stress test*) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (*BI Rate*) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Kata kunci: *stress test*, risiko kredit, bank, model ARDL, Indonesia.

Juli Panglima Saragih (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)

KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROVINSI-PROVINSI SUMATERA TAHUN 2010-2015

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 131-146

Abstrak

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat terhadap PDB selama periode 2005-2010. Industri manufaktur di Pulau Sumatera sebagian besar berbasis perkebunan, sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. *Estimasi* penghitungan LQ menggunakan data-data industri manufaktur se-Sumatera dalam periode 2010-2015. Dari hasil analisis LQ tersebut diperoleh antara lain bahwa industri manufaktur di Pulau Sumatera periode 2010-2015 memiliki nilai $LQ < 1$. Ini menunjukkan secara agregat industri manufaktur di Pulau Sumatera masih belum dapat diandalkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi (PDB) regional Pulau Sumatera walaupun berkontribusi positif terhadap industri manufaktur nasional. Namun jika berdasarkan LQ provinsi, industri manufaktur tumbuh signifikan hanya terjadi di tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Sedangkan dua provinsi yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung ditemukan memiliki pertumbuhan moderat. Lima provinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dalam periode yang sama. Antara pulau di Indonesia, kontribusi industri manufaktur Pulau Sumatera relatif besar setelah Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lain di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah perlunya diversifikasi industri di Pulau Sumatera sesuai potensi sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat struktur industri manufaktur di Pulau Sumatera tersebut. Diversifikasi industri dimaksud tidak hanya industri berbasis perkebunan dan sumber daya alam saja. Kebijakan industri nasional ke depan selayaknya memperhatikan temuan studi ini supaya pertumbuhan industri di Pulau Sumatera semakin optimal.

Kata kunci: industri manufaktur, kinerja sektor industri, Produk Domestik Bruto, Sumatera.

Mandala Harefa (Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI)

HUBUNGAN DANA BAGI HASIL DENGAN PENERIMAAN DAERAH DAN KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 147-160

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Kata kunci: transfer fiskal, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana perimbangan, sumber daya alam.

Muhammad Ilham Riyadh (Universitas Islam Sumatera Utara)

ANALISIS SALURAN PEMASARAN LIMA PANGAN POKOK DAN PENTING DI LIMA KABUPATEN SUMATERA UTARA

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hal. 161-171

Abstrak

Kurang meratanya ketersediaan pangan, dan timpangnya jalur distribusi dari produsen ke konsumen menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi yang banyak rusak sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat produsen. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis (1) saluran pemasaran komoditas pangan, (2) efisiensi tata niaga pada setiap saluran pemasaran, dan (3) kebijakan tata niaga komoditas pangan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 daerah kabupaten yang memiliki keunggulan komoditas pangan, yaitu Simalungun (beras), Karo (jagung), Dairi (bawang merah), Tapanuli Utara (cabai merah), dan Langkat (sapi). Metode analisis margin tata niaga, *farmer's share*, dan *B/C ratio*. Panjangnya saluran pemasaran akan meningkatkan disparitas harga yang tinggi sehingga dapat merugikan petani dan konsumen. Komoditas padi mengalami disparitas paling tinggi yaitu sebesar 132 persen, rasio keuntungan petani komoditas cabai merah tertinggi yaitu sebesar 45,31 persen. *Farmer share* tertinggi komoditas cabai merah 89 persen. Tata struktur pasar yang dihadapi oleh petani beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi potong cenderung persaingan pasar tidak sempurna. Harga kesepakatan penjual dan pembeli merupakan hasil dari tawar-menawar, sedangkan cara pembayaran pembeli atas harga kesepakatan bisa dengan cara tunai dan angsuran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan terampil dalam kewirausahaan dalam upaya pembinaan petani serta menghususkan diri untuk pelayanan dan pemasaran komoditas.

Kata kunci: tata niaga, pangan, saluran pemasaran, *farmer share*, pendapatan.

Kumara Jati (Trade Policy Analysis and Development Agency) dan Arie Mardiansyah (Trade Policy Analysis and Development Agency)

PERAN KOMUNIKASI MASSA TERHADAP INTERVENSI PASAR KOMODITAS BERAS DI INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, hal. 173-186

Abstract

Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Terkadang intervensi pasar harus dilaksanakan oleh pemerintah di luar musim panen untuk mengendalikan dan mengelola harga beras dan inflasi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana aspek komunikasi sangat penting sebagai mekanisme intervensi pasar untuk mengendalikan harga dan stok beras di Indonesia. *Autoregressive and Moving Average and Autoregressive Conditional Heteroskedasticity / Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity* serta *the Structural Time-Series Model* digunakan dengan *variabel dummy* pada data stok dan harga beras, baik harian maupun bulanan, antara 1 Januari 2015 hingga 27 Juni 2016. Hasil analisis menyimpulkan bahwa komunikasi massa oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan konsumen) dapat berjalan dengan baik terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras. Namun demikian, model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan *variabel dummy* yaitu komunikasi massa, serta jumlah operasi pasar dan kebijakan beras kurang berpengaruh terhadap harga beras namun lebih berpengaruh terhadap stok beras. Kemudian, *the Structural Time-Series Model* menunjukkan bahwa naik turunnya harga dan stok beras berasal dari komponen musiman dan siklus terutama lebih berfluktuasi pada bulan Januari-Maret. Oleh karena itu, otoritas terkait diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan beras untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kata kunci: intervensi pasar, ARMA, ARCH/GARCH, *structural time-series model*.

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 9, NO. 2, DECEMBER 2018

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Hotmaria Elecktawati Lumbangaol (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) dan **Ernawati Pasaribu** (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)

EXISTENCE AND DETERMINANTS OF MIDDLE INCOME TRAP IN INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 83-97

Abstract

World Bank has classified that Indonesia has been included in lower-middle income countries in the last 13 years. This shows that Indonesia's economic growth is quite stagnant for a long time and made Indonesia very potential to enter MIT. This study applies to identify whether Indonesia is already included in MIT. The time series analysis of ECM is also used to determine actions that can be taken in the long term to get out or avoid MIT. GNP per capita as the basis classification of income groups of countries in the world used as a variable to see MIT. The results show that both in the short and long term, service sector and high-educated labour have a positive effect to GNP per capita. The agricultural sector has a positive effect only in the short term, while the manufacturing sector is negatively affected in the long term. Economic structure condition that not supported together by these economic sectors show that economic structural transformation did not go well and indicates that Indonesia has fallen into MIT. The government is expected to improve the services sector, PMTB, and high-educated labour and improve the agricultural and manufacturing sectors in Indonesia as a way to get out from MIT and transition to developed countries.

Keywords: MIT, GNP per capita, ECM.

Radot Manalu (Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu IPTEK (PAPPIPTEK)-LIPI)

PROCESSING OF SMALLHOLDER PLANTATIONS COCOA PRODUCTION TO INCREASE FARMERS INCOME

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 99-111

Abstract

The cocoa commodity is one of the plantation commodities in Indonesia which has an important role for the national economy to increase the country's foreign exchange. However, the quality of Indonesian cocoa, especially the production of smallholder cocoa beans, is still low. The results showed that smallholder plantations farmers in South Sulawesi Province did not pay attention to the quality of cocoa beans because usually farmers sell cocoa beans that have not been fermented. If farmers of smallholder cocoa plantations process cocoa beans with fermentation technology will get better quality and economic value because the price of fermented cocoa beans is higher than the price of unfermented cocoa beans with a price difference of around Rp3,000/kg - Rp5,000/kg. In addition to improving quality to obtain better economic value, the results of the study also show that animal feed from fermented cocoa beans is also better than non-fermented cocoa beans. The purpose of this study is to review and formulate policy recommendations to improve the quality of cocoa beans produced by smallholders to increase farmer income. Therefore, technical guidance on the management of cocoa beans from the local government to smallholder plantation farmers is very important so that the quality of farmer cocoa beans can be improved. Furthermore, in the future the cocoa development program in the future must be directed towards efforts to realize high-quality cocoa bean products, so as to obtain better economic value especially for farmers as suppliers of cocoa beans. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research sample was taken through purposive sampling technique. Data analysis was carried out with a qualitative exploratory approach with a research framework for post-harvest cocoa bean processing so that it could explain and answer problems in the study.

Keywords: processing, quality, cocoa, income, farmers, and technology.

Indra (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia)

A MACRO STRESS TEST MODEL OF CREDIT RISK: AN EMPIRICAL STUDIES OF CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 113-129

Abstract

This paper proposes a model to conduct macro-stress tests of credit risk for conventional and Islamic banking in Indonesia based on scenario analysis. The aims are to investigate and to compare the financial system resilience of the two banking systems from various macroeconomic shocks. It used NPL and NPF to measures credit risk of conventional and Islamic banking. It considered several exogenous macroeconomic variables, namely Gross Domestic Product, Exchange Rate, Consumer Price Index, and Interest Rate. It applied the ARDL model which is estimated for each type of bank credit portfolio that splits into 9 sectors. It found that a decreased in GDP, exchange rate depreciation, an increased in CPI, and interest rates contributed to encouraging a rose in both NPL and NPF levels. CPI was the biggest source of vulnerability to credit risk in both groups of banks, followed by GDP, exchange rates, and interest rates. This evidence indicates that the vulnerability of the financial system in both groups of banks did not only depend on the internal performance in each bank but also depend on the external shocks. It also confirmed that although Islamic banks and conventional banks used different operating systems, they could not be separated from macroeconomic shocks.

Keywords: stress test, credit risk, bank, ARDL model, Indonesia.

Juli Panglima Saragih (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)

MANUFACTURING INDUSTRY PERFORMANCE IN SUMATRA PROVINCES 2010-2015

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 131-146

Abstract

Manufacturing industry has given significant contribution to Indonesia's gross domestic product since 2005-2010. Most of manufacturing industry in Sumatera island were mainly represented by agroindustry, and oil and gas industries. This research aims to analyze manufacturing industry performance in Sumatera island in terms of its share in Sumatera GDP and comparing it to total production of national manufacturing industry. This study uses Location Quotient methods to analyse contribution of manufacturing industry on Sumatera GDP. This study finds that Location Quotient of manufacturing industry of Sumatera island is overall less than 1 in period of 2010-2015. It indicates that manufacturing industry in Sumatera gives less significant contribution to overall of GDP of Sumatera. However, in terms of provinces in Sumatera island, the highest shares of manufacturing industry to GDP were in three provinces, namely, North Sumatera, Riau islands, and Riau provinces. Whilst in other provinces in Sumatera, the shares of industry to GDP were moderate and small. This study suggests that to improve the shares of industry in Sumatera island to GDP, the government must diversify its manufacturing industries from natural resource base to other local specific base resources. These findings should be accommodated in future policy to improve the economic growth in Sumatera island in particular and Indonesia in general.

Keywords: *manufacturing industry, Location Quotient, performance of industry sector, gross domestic product, Sumatera Island.*

Mandala Harefa (Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI)

RELATIONSHIP OF REVENUE SHARING WITH REGIONAL REVENUE AND POVERTY IN EAST KALIMANTAN PROVINCE

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 147-160

Abstract

The policy of regional autonomy within fiscal decentralization has significantly increased the amount of fiscal transfer fund to province, as well as municipality/district level. Those policy aims to reduce inter-regional inequality of regional fiscal capacity in order to improve the quality of public services in each regional government. But, based on other previous research, those policy doesn't have significant impact on overall revenue of East Kalimantan Province Budget. This study aims to analysis whether fiscal transfer policy such as revenue sharing from natural resources giving positive impact on revenue of East Kalimantan Province. This study uses qualitative methods to explain problems related to the implementation of fiscal decentralization policy. The results of this study showed that the revenue sharing from natural resources received by East Kalimantan Province in recent years had exactly decrease. One of the factors is the impact of the declining of natural resource production, in this case, the simultaneous decline of coal production which is due to a drastic decrease in prices on the world market. This factor has a significant impact on the implementation of regional development programs and on the efforts to reduce poverty. Therefore, the government of East Kalimantan Province must find any alternatives in spending funds sourced from DBH for productive investments that have a multiplier effect on regional economic development. This condition can be seen from the results of the accelerated economic growth of East Kalimantan Province which is still below the national average of 0.90 percent.

Keywords: *fiscal transfers, local revenue, revenue sharing funds, balancing funds, natural resources.*

Muhammad Ilham Riyadh (Universitas Islam Sumatera Utara)

ANALYSIS OF MARKETING CHANNEL OF THE FIVE ESSENTIALS AND IMPORTANT FOOD IN FIVE DISTRICTS OF NORTH SUMATRA

JEKP, Vol. 9, No. 2, December 2018, pp. 161-171

Abstract

The lack of equal distribution of food, and the imbalance of distribution channels from producers to consumers shows that the production systems and distribution systems of some foods are disrupted because the quality of transportation facilities and infrastructure is much damaged so that price increases at the consumer level are far greater than the price increases at the producer level. The research objectives are to analyze (1) the supply channel of food commodities, (2) the efficiency of trading in each trading channel, and (3) the trade policy of food commodities. This research was conducted in North Sumatra Province with 5 Districts having superiority in food commodities, namely Simalungun (rice), Karo (corn), Dairi (red onion), North Tapanuli (red chili), and Langkat (beef). Methods of analysis of trading margins, farmer's share, and B/C ratio. The length of the marketing channel will increase the price disparity so that it can harm farmers and consumers. Rice commodities experience 132 percent high disparity and the highest profit ratio of farmers for red chili commodities is 45.31 percent. The highest farmer share of red chili is 89 percent. The structure of the market structure faced by farmers of rice, corn, shallots, red chili, and beef cattle tends to be imperfect market competition. The price of the agreement between the seller and the buyer is the result of the bargaining, while the way the buyer payments for the price of the agreement can be in cash and installments. One of the effort that can be done to improve marketing efficiency is to prepare a strong and skilled farmer institution in entrepreneurship in an effort to foster farmers and specialize in the delivery and marketing of commodities.

Keywords: trading, food, marketing channels, farmer share, revenue

Kumara Jati (Kementerian Perdagangan) dan Arie Mardiansyah (Kementerian Perdagangan)

THE ROLE OF MASS COMMUNICATIONS TO THE MARKET INTERVENTIONS OF RICE COMMODITY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, pp. 173-186

Abstrak

The rice is a staple food for the people and significantly contributes to economic development in Indonesia. Occasionally a market intervention should be implemented by the Government of Indonesia during the low harvest season to control and to manage the price of rice and the inflation, so low-income society could meet their basic needs. This study examines how communication aspect is really important as a part of market intervention mechanism to control the price and the stock of rice in Indonesia. Autoregressive and Moving Average, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity/Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, and the Structural Time-Series Model are applied with a dummy variable on daily and monthly data of the stock and the price of rice from January 1, 2015 until June 27, 2016. It can be inferred from the data that the form of mass communication by the government to relevant stakeholders (channel distribution and consumers) can run well, especially in order to maintain the supply and the price stabilization of rice. Nevertheless, the ARMA(1,1)-GARCH(1,1) model with dummy variables, inter alia mass communication, and also the number of market operations and rice policy, are not so influential on the price of rice, but more influence on the stock of rice. Then, the Structural Time-Series Model shows that the fluctuation of price and stock is affected by seasonal and cycle components especially more fluctuated in the month of January-March. Therefore, the relevant authorities are expected to maximize the rice policy in order to maintain the price stability in the short term, medium term, and long term.

Keywords: market interventions, ARMA, ARCH/GARCH, structural time-series model.